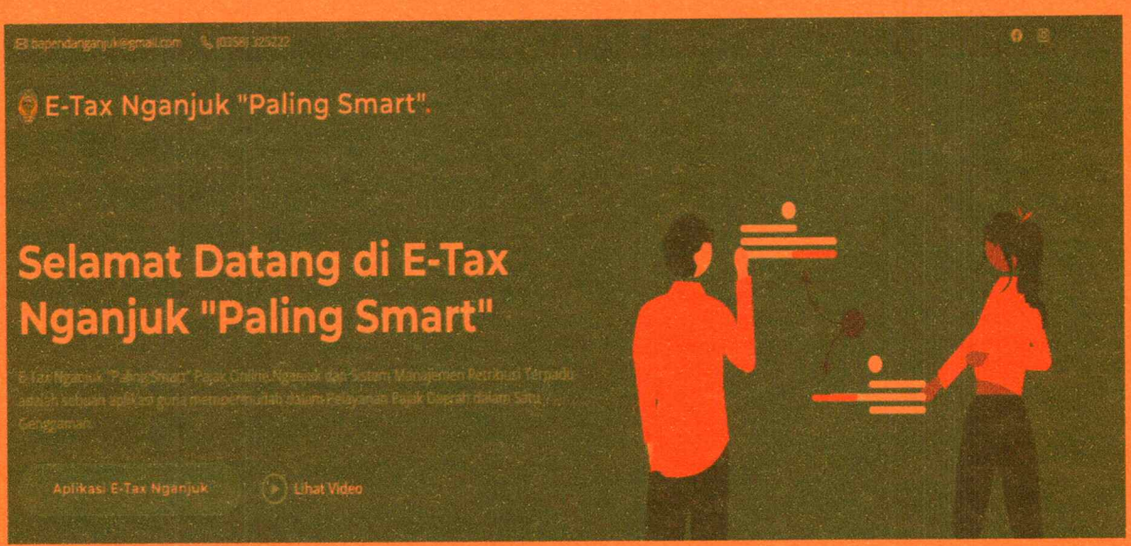
Bapenda Kabupaten Nganjuk

#PANTAS
PAJAK LUNAS PEMBANGUNAN TUNTAS

RANCANGAN AKHIR RENJA

TAHUN 2026

BADAN PENDAPATAN DAERAH



MEMBAYAR PAJAK NON TUNAI CEPAT, MUDAH, MURAH, AMAN, HANDAL

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

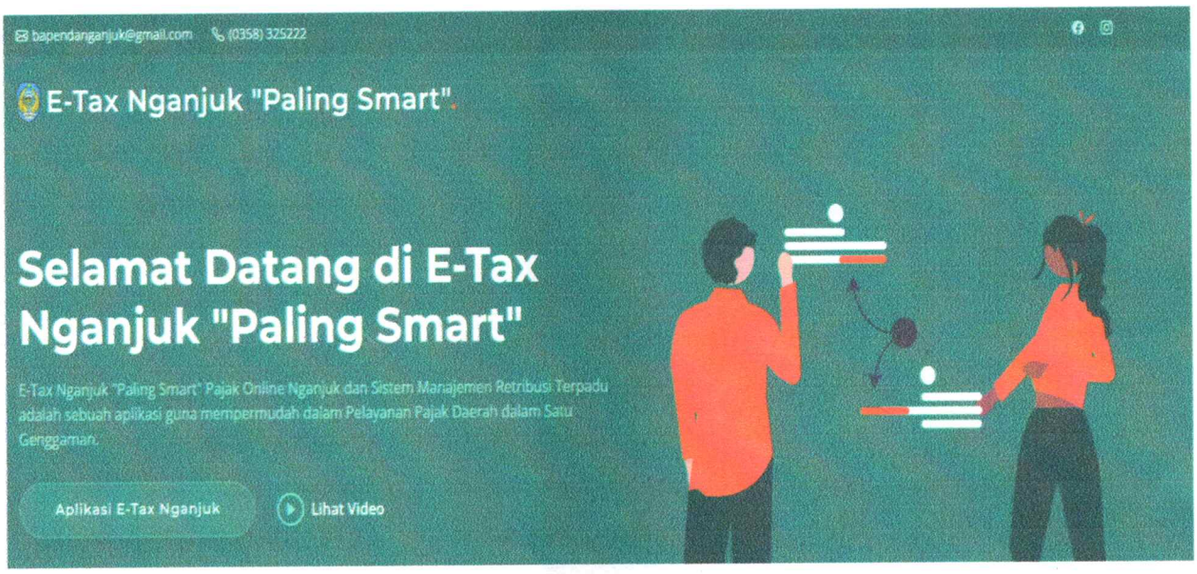
Bapenda Kabupaten Nganjuk

#PANTAS PAJAK LUNAS PEMBANGUNAN TUNTAS

RANCANGAN AKHIR RENJA

TAHUN 2026

BADAN PENDAPATAN DAERAH



MEMBAYAR PAJAK NON TUNAI CEPAT, MUDAH, MURAH, AMAN, HANDAL

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga melayani bangsa

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2026. Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 disusun dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 126 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan didalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu unsur penunjang sebagai pelaksana dibidang pengelolaan pendapatan daerah, dalam hal ini mengembang misi ke-2 Rencana Pembangunan daerah (RPD) Tahun 2025-2029 yaitu "Meningkatkan Kinerja Birokrasi yang Bersih, Profesional dan Akuntabel demi Masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui Penyelenggaraan Pemerintah yang Aspiratif, Partisipatif dan Transparan dengan program unggulan peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi". Pada misi kedua ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai pendukung

dengan Program Kemandirian Keuangan Daerah, Indikator Prosentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Realisasi Belanja Daerah.

Visi dan misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut memiliki keterkaitan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan didalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk 2025-2029 sebagai berikut:

Tujuan dari misi ke 2 ini Meningkatnya tatakelola Pemerintahan daerah yang akuntabel. Dalam pencapaian tujuan tersebut program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Pengelolaan Pendapatan daerah dengan Outcome:

1. Meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak/wajib pungut/Wajib Retribusi dengan Indikator Prosentase Kepatuhan Wajib Pajak/Retribusi/Wajib Pungut
2. Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah dengan Indikator Presentase Peningkatan Subyek/Obyek Pajak Daerah yang Dimutakirkan
3. Meningkatnya Penerapan Sistem Informasi Pajak Daerah berbasis Digital dengan Indikator Indeks Elektronifikasi Pemerintah Daerah
4. Meningkatnya Deviden atas peyertaan Modal pada BUMD dengan Indikator Prosentase Realisasi Deviden
5. Meningkatnya Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang sah dengan Indikator Presentase Realisasi Lain-lain PAD yang sah.

Sasaran pada Misi 2 adalah :

1. Meningkatnya tatakelola Pemerintah daerah yang baik dan pelayanan publik yang inovatif
2. Meningkatnya transformasi dan kapasitas fiskal daerah

Dari dua sasaran tersebut Badan Pendapatan Daerah masuk dalam sasaran kedua yaitu *Meningkatnya transformasi dan kapasitas fiskal daerah, Indikator Rasio kapastas fiskal daerah*, dengan Outcome Meningkatnya pengelolaan Pendapatan, dan program proritas untuk tercapainya hal tersebut yaitu Program Pengelolaan Pendapatan daerah dengan Indikator :

1. Prosentase Kepatuhan Wajib Pajak/Retribusi/Wajib Pungut
2. Prosentase Peningkatan Subyek/Obyek Pajak Daerah yang dimutakirkan
3. Indeks Elektronifikasi Pemerintah Daerah
4. Prosentase Realisasi Deviden
5. Prosentase Realisasi lain-lain PAD yang sah

Dalam mewujudkan Tujuan, sasaran tersebut, Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Nganjuk menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 Selanjutnya, Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2026.

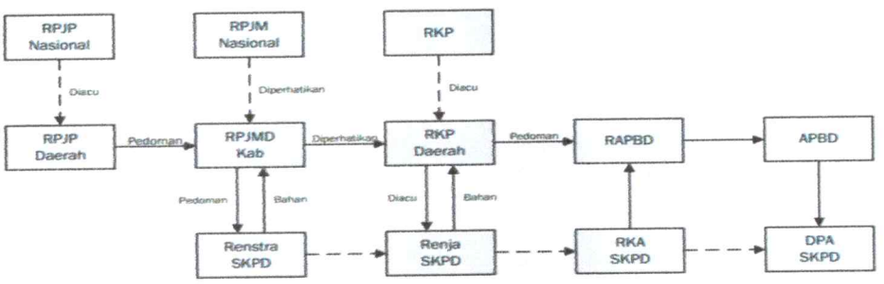
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan akhir;
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis dalam kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2029 dan Renstra Bapenda Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang menjadi satu kesatuan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Gambar 1.

Diagram Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

1.1. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan;
18. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tantang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2045;

32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Dearah;

33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;

35. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;

36. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu;

37. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Pemungutan Pajak Daerah;

38. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.

1.2.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 adalah:

a. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif Tahun 2026 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026;

b. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 pada tahun ke-3 (ke-tiga) periode tahun 2026; dan

c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2026.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang;
1.2. Landasan Hukum;
1.3. Maksud dan Tujuan; dan
1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
3.2. Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2026;
3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Keterkaitan dengan Kebijakan Nasional Dalam pelaksanaan kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk untuk menindaklanjuti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah telah tersusun :

1. Peraturan Daerah No 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah tanggal 28 Desember 2023;
2. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor1 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan tata cara pemungutan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan retribusi Perijinan tetentu tanggal 19 Pebruari 2024;
3. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Pemungutan Pajak Daerah tanggal 23 April 2024.

Sedangkan terkait Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2021 tentang satuan tugas percepatan dan perluasan Digitalisasi daerah, Permendagri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan digitalisasi Daerah Provinsi dan kabupaten/Kota serta tata cara implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah telah disusun :

- Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/92/K/411.012/2021 tentang Pembentukan Tim percepatan dan perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Nganjuk;
- Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 tahun 2023 tentang Implementasi Elektronifikasi transaksi Pemerintah daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
- Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/95/K/411.013/2022 tentang Peta jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk;

- Instruksi Bupati Nganjuk Nomor 88//870/411.403/2022 tebtabg Percepatan digitalisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk.

Hasil dari Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah pada semester 1 Tahun 2024 memperoleh tahap DIGITAL dengan Score 94,55% sebagai bukti berikut :

Tabel. 2.1

No	Kota/Kabupaten	Skor IETPD Sem I 2024 Prediksi
1	Kota Blitar	97.00%
2	Kota Kediri	99.00%
3	Kota Madiun	98.75%
4	Kabupaten Blitar	95.65%
5	Kabupaten Kediri	95.75%
6	Kabupaten Madiun	96.65%
7	Kabupaten Magetan	90.15%
8	Kabupaten Nganjuk	94.55%
9	Kabupaten Ngawi	98.75%
10	Kabupaten Pacitan	91.80%
11	Kabupaten Ponorogo	97.50%
12	Kabupaten Trenggalek	94.25%
13	Kabupaten Tulungagung	98.75%

Sedangkan pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui capain kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

3.3.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025 yang mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2025, serta pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
(Target Berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Badan Pendapatan Daerah

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2022	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun(n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasai Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
KEUANGAN									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan pajak daerah	75,85 %	91	85 %	81,42 %	95,79	85,25 %	85,25	112%
	Nilai Sakip SKPD	A (90)	B	BB			A	A	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									

Tersusunya dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan data kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	dok	17	13	dok	15	Dokumen	115,38	13	Dokumen	13	100,00
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	Lap	7	7	Lap	6	Lap	85,71	7	Lap	7	100,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	dok	10	6	dok	9	Dokumen	150,00	6	Dokumen	6	100,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	Lap	7	7	Lap	6	Lap	85,71	7	Lap	7	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	orang	37	45	dok	35	Orang	77,78	45	Orang	45	100,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	orang	37	45	dok	35	Orang	77,78	45	Orang	45	100,00
Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	37	Laporan	37	37	Laporan	37	Laporan	100,00	25	Laporan	25	22,52
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	1	lap	1	Laporan	100,00	1	Laporan	1	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	1	lap	1	Laporan	100,00	1	Laporan	1	100,00

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	37	Laporan	37	37	Laporan	37	Laporan	100,00	25	Laporan	25	22,52
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													
Tersusunnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Lap	1	1	Lap	1	Lap		1	Lap	1	100,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Lap	1	1	Lap	1	Lap		15	Lap	15	1.500,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													

Tersedianya data administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Dokumen	12	12	Dokumen	8	Dokumen	66,67	12	Dokumen	12	100,00
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	63	Orang	63	63	org	54	Orang	85,71	63	Orang	63	100,00
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	44	Paket	43	44	Paket	36	Paket	81,82	44	Paket	44	100,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	44	Paket	43	44	Paket	36	Paket	81,82	44	Paket	44	100,00
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Dokumen	12	12	Dokumen	8	Dokumen	66,67	12	Dokumen	12	100,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													

Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	63	Orang	63	63	org	54	Orang	85,71	63	Orang	63	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah													
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	135	Paket	10	90	Paket	90	Paket		100		100	74,07
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	225	Paket	10	90	Paket	90	Paket		100		100	74,07
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45	Paket	63	60	Paket	60	Paket	100,00	60	Paket	60	100,00
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.120	Dokumen	1.110	1.120	Dokumen	1120	Dokumen	100,00	1.120	Dokumen	1.120	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	135	Paket	10	90	Paket	90	Paket		100		100	74,07
Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
Tersedianya Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik	45	Paket	63	60	Paket	60	Paket	100,00	60	Paket	60	100,00

Kantor	Kantor yang Disediakan												
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	225	Paket	10	90	Paket	90	Paket		100		100	74,07
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.120	Dokumen	1.110	1.120	Dokumen	1120	Dokumen	100,00	1.120	Dokumen	1.120	100,00
Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	Dokumen	12	12	Dokumen	12	Dokumen	100,00	12	Dokumen	12	100,00
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	12	12	Laporan	12	Laporan	100,00	12	Laporan	12	100,00
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12	12	Laporan	12	Laporan	100,00	12	Laporan	12	100,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu													
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	12	12	Laporan	12	Laporan	100,00	12	Laporan	12	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan													

Konsultasi SKPD												
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12	12	Laporan	12	Laporan	100,00	12	Laporan	12	100,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	Dokumen	12	12	Dokumen	12	Dokumen	100,00	12	Dokumen	12	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	unit	34	16	Unit	16	Unit	100,00	5	Unit	5	25,00
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	187	Paket		187	Paket	187	Paket			Paket		-
Pengadaan Mebel													
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	187	Paket		187	paket	187	paket			paket		-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	unit	34	16	Unit	16	Unit	100,00	5	Unit	5	25,00

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	12	Laporan	12	Laporan	100,00	12	Laporan	12	100,00
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12	12	Laporan	12	Laporan	100,00	12	Laporan	12	100,00
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	12	Laporan	12	Laporan	100,00	12	Laporan	12	100,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12	12	Laporan	12	Laporan	100,00	12	Laporan	12	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	12	Laporan	12	Laporan	100,00	12	Laporan	12	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	12	Laporan	12	Laporan	100,00	12	Laporan	12	100,00

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19	unit	19	19	unit	19	unit	100,00	19	unit	19	100,00
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	unit	17	10	unit	10	unit	100,00	10	unit	10	100,00
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22	unit	47	22	unit	23	unit	104,55	22	unit	22	100,00
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	gedung	1	1	gedung	1	gedung	100,00	1	gedung	1	100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19	unit	19	19	unit	19	unit	100,00	19	unit	19	100,00

atau Lapangan										
Pemeliharaan Mebel										
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	unit	17	10	unit	10	unit	100,00	10	unit	10	100,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22	unit	47	22	unit	23	unit	104,55	22	unit	22	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	gedung	1	1	gedung	1	gedung	100,00	1	gedung	1	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
1. Meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak/wajib pungut/Wajib Retribusi	Prosentase Kepatuhan Wajib Pajak/Retribusi/ Wajib Pungut												
KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
1. Tersusunnya laporan data realisasi Pajak dan Retribusi daerah	Jumlah laporan data realisasi Pajak dan retribusi												
Subkeg. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah													

Tersusunnya laporan data Realisasi Pajak daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12	Dokumen	12,00	12	Dokumen	12	Dokumen	100,00	12,00	Dokumen	12,00	100,00
Subkeg. Penagihan Pajak daerah													
Tersedianya data hasil penagihan piutang pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan	12	Dokumen	12,00	12	Dokumen	12	Dokumen	100,00	12,00	Dokumen	12,00	100,00
Subkeg. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah													
Tersedianya sarana prasaranan pajak daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah"	25	Jenis	26,00	25	Jenis	25	Jenis	100,00	25,00	Unit	25,00	100,00
KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
2. tersusunnya laporan Wajib Pajak/Retribusi yang membayar tepat waktu dan tepat jumlah	Jumlah Laporan Wajib Pajak/Retribusi yang membayar tepat waktu dan tepat jumlah												
Subkeg. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah													

penyusunan dokumen penyelesaian pangajuan keberatan, pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan	12	Dokumen	12,00	12	Dokumen	12	Dokumen	100,00	12,00	Dokumen	12,00	100,00
Subkeg. Pengendalian, pemeriksaan dan Pengawasan pajak Daerah													
1.2.1. penyusun an dokumen hasil pengawasan, pemeriksanaan pajak	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12	Dokumen	1,00	12	Dokumen	12	Dokumen	100,00	12,00	Dokumen	12,00	100,00
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah													
2.3.1. penyusun an laporan Hasil Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah												
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
2. meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi Pajak dan retribusi daerah	Presentase peningkatan subyek/obyek pajak/Retribusi daerah yang dimutakirkan												

KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH										
1. Tersusunnya laporan hasil pemuthakiran subyek / obyek pajak/Retribusi	Jumlah laporan hasil pemuthakiran subyek / obyek pajak/Retribusi									
Subkeg. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah										
Penyusunan laporan hasil pendataan, Pendaftaran Obyek Pajak/Subyek Pajak dan Wajib pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah"	12	Laporan	12,00	12	Laporan	12	Laporan	100,00	12,00	Laporan	12,00	100,00
Subkeg. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)										
Data hasil penilaian PBB-P2 dan BPHTB	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	3000	OP	5.873,00	3000	OP	7192	OP	239,73	3.000,00	OP	3.000,00	100,00
Subkeg penetapan Ketetapan Pajak Daerah										

dokumen Surat Ketetapan Pajak dan Retibusi daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	24	Dokumen	24,00	24	Dokumen	24	Dokumen	100,00	24,00	Dokumen	24,00	100,00
KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
2. Tersusunnya dokumen hasil pendataan obyek/subyek pajak/Retribusi baru	Jumlah hasil pendataan obyek/subyek pajak/Retribusi baru												
Subkeg. Perencanaan pengelolaan pajak daerah													
penyusunan dokumen hasil perencanaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak	3	Dokumen	3,00	3	Dokumen	3	Dokumen	100,00	3,00	Dok	3,00	100,00
Subkeg. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah													
Penyusunan dokumen hasil Analisa dan pengembangan dan kebijakan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3	Dokumen	3,00	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00	1,00	Dok	3,00	100,00

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH									
3. meningkatnya penerapan sistem informasi Pajak daerah berbasis digital	Indeks Elektronifikasi Pemerintah daerah								
KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH									
Penyusunan laporan Elektronik Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pembayaran pajak dan retribusi secara online								
Subkeg. Elektronifikasi Transaksi Pemerintahan Daerah									
Pelaporan realisasi pembayaran pajak dan retribusi non tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12 laporan	-	12 laporan	12 laporan	100,00	12,00 laporan	12,00	100,00
Subkeg. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah									
Laporan IKM Layanan Pajak daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	35000 Layanan	34.955,00	35000 Layanan	28562 Layanan	81,61	35.000,00 Layanan	35.000,00	100,00

Subkeg Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah									
Laporan pelaksanaan punyuluhan pajak daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	4,00	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12,00 Laporan	12,00	100,00
Subkeg. Pengolahan Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah									
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH									
4. Meningkatnya Deviden atas peyertaan modal pada BUMD	Prosentase realisasi Deviden								
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH									
5. Meningkatnya Realisasi penerimaan lain-lain PAD yg sah	Persentaserealisasi lain-lain PAD yg sah								

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kategorisasi Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	≥ 91%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4
Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program (Renstra Perangkat Daerah)	Capaian Kinerja	Predikat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	95,79%	Sangat tinggi

Program Pengelolaan Pendapatan 1. Jumlah wajib pajak yang membayar teapt waktu 2. Jumlah wajib pajak baru 3. Prosentase Realisasi Pajak Daerah 4. Prosentase Realisasi Retribusi Daerah yang dikelola	91,80 87,30 107.31% 121,42%	Sangat Tinggi Tinggi Sedang Sedang
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
1. Lokasi sulit terjangkau dengan SDM yang terbatas	Target tidak Optimal	1. Kerja sama dengan Pihak ketiga
1. Belum semua Subyek Pajak ditetapkan sebagai Wajib Pajak	Target tidak optimal	- Melaksanakan Pendataan secara terus menerus - Melaksanakan sosialisasi kepada Wajib Pajak
2. Wajib pungut kuatir apabila ditambah pajak, konsumen tidak mau membeli lagi	Realisasi tidak optimal	- Melaksanakan sosialisasi kepada Wajib Pungut - Melaksanakan sosialisasi kepada Masyarakat melalui Media sosiaal, pemasangan banner
3. Sistem Pengelolaan Pajak dan retribusi terganggu (virus, Hacker)	Penerimaan tertunda	Memasang alat untuk mengantisipasi virus, hacker
4. WP/WR tidak melaporkan pajak sesuai omset penjualan/penggelapan pajak	Realisasi tidak optimal	- Melaksanakan sosialisasi kepada Wajib Pajak - Melaksanakan pengawasan
5. Kurangnya kuantitas & kualitas SDM	Target dan realisasi tidak optimal	Mengusulkan sdm untuk mengikuti Bintek Pemeriksa Pajak, Analis Pajak, Juru sita, Penagihan pajak

6. Masih adanya piutang pajak	Realisasi tidak optimal	1. Menyusun TIM Penyelesaian Piutang Pajak 2. Verifikasi data piutang 3. Penghapusan piutang
7. Pembayaran Pajak Tunai	Penerimaan ada yang dibawa oleh petugas pungut	Sosialisasi pembayaran non tunai kepada masyarakat, wajib pungut baik secara tatap muka, media social, banner
8. Belum optimalnya penerimaan Retribusi Daerah	Realisasi tidak optimal	Melaksanakan Koordinasi dan rekonsiliansi dengan OPD Penghasil
9. Belum optimalnya penerimaan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Realisasi tidak optimal	Melaksanakan Koordinasi dan rekonsiliansi dengan OPD Penghasil
10. Belum optimalnya penerimaan Lain-lain PAD yang sah	Realisasi tidak optimal	Melaksanakan Koordinasi dan rekonsiliansi dengan OPD Penghasil

i. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah sesuai Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah selama 5 (lima) Tahun atau Tahun 2020 s/d 2024 sebagai berikut :

TABEL 2.5

REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN 2024

URAIAN	TAHUN 2022			TAHUN 2021			TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
PENDAPATAN	2.452.965.706.266,00	2.502.024.164.155,83	102,00	2.444.412.672.174,00	2.606.023.590.227,47	106,61	2.335.585.700.404,39	2.435.396.958.079,43	104,27
PENDAPATAN ASLI DAERAH	384.183.486.327,00	445.907.239.703,83	116,07	359.762.424.055,00	475.640.256.030,47	132,21	323.260.574.754,39	402.347.144.361,43	124,47
PENDAPATAN TRANSFER	1.910.407.441.736,00	1.906.607.928.426,00	99,80	1.975.606.394.507,00	2.021.339.481.197,00	102,31	1.435.075.828.974,00	1.441.047.387.801,00	100,42
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	158.374.778.203,00	149.508.996.026,00	94,40	109.043.853.612,00	109.043.853.000,00	100	577.249.296.676,00	592.002.425.917,00	102,56

URAIAN	TAHUN 2024			TAHUN 2023		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
PENDAPATAN	2,804,569,512,470.00	2,835,087,286,113.27	101.09	2,616,757,661,539.00	2,687,352,190,308.02	102.70
PENDAPATAN ASLI DAERAH	481,571,527,997.00	486,128,002,946.27	100.95	372,424,742,693.00	402,512,776,786.02	108.08
PENDAPATAN TRANSFER	2,322,997,984,473.00	2,348,959,283,167.00	101.12	2,190,454,229,144.00	2,234,991,486,508.00	102.03
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SYAH	0.00	0.00		53,878,689,702.00	49,847,927,014.00	92.52

Capaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama *(core bussiness)* dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

Cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk adalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Bapenda Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yaitu :

- Persentase PAD terhadap Pendapatan.
- Persentase Kenaikan PAD

Hasil Analisis pencapaian Kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat di Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

No	Indikator	Target Renstra 2024-2026			REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	Proyeksi	
		Tahun n 2024	Tahun n +1 2025	Tahun n +1 2026	Tahun n-2 2024		Tahun n-1 2025	Tahun n 2026
1	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	20.00	20.25	20.50	17.16	85.80	20.25	20.50
2	Prosentase kenaikan Pendapatan Asli daerah	18.00	8.00	8.50	20.88	116.00	8.00	8.50

Berdasarkan Tabel tersebut dapat dianalisa sebagai berikut :

- Tujuan

  Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan dengan Indikitor Prosentase PAD terhadap

Pendapatan, Untuk Tahun n-2 atau Tahun 2024 dengan realisasi kinerja 17,16% dari target 20% sehingga capaian kinerja 85,80% dengan perhitungan :

- Realisasi PAD Tahun 2024 sebesar Rp 486.567.560.900,79
- Realisasi Pendapatan tahun 2024 Rp 2.835.087.286.113,27

PAD/Pendapatan 17.16%

Target 20%

Capaian kinerja 85,80%

Tidak tercapainya target kinerja tujuan dikarenakan berlakunya UU no 1 Tahun 2022 tentang HKPD yaitu adanya rekening Retribusi yang sudah tidak bisa dipungut lagi, sedangkan untuk Obsen PKB dan obsen BBNKB masih berlaku di tahun 2025 dan juga berkurangnya realisasi dana BLUD.

- Sasaran

Sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan Indikator Prosentase peningkatan PAD yang rumusan perhitungannya adalah Realisasi PAD Tahun berjalan dikurangi realisasi PAD Tahun lalu dibanding Realisasi PAD Tahun lalu dikali 100%.

- Capaian sasaran kinerja Tahun n-2 atau Tahun 2024 tercapai 20,88% dari target 18 % yang terealisasi 116%

Capaian sasaran tersebut dapat dilihat dari perhitungan dibawah ini :

- Realisasi PAD Tahun 2024 486.567.560.900,79
- Realisasi PAD Tahun 2023 402.512.776.786,02
- Keanikan PAD 84.054.784.114,77
- Realisasi kinerja Sasaran 20,88%
- Target 18%
- Capaian Kinerja 116%

pada Tahun 2024 capain kinerja sasaran tercapai 20,89% dikarenakan adanya :

- Implementasi Regulasi Pajak dan Retribusi daerah;
- Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi daerah;
- Optimalisasi Digitalisasi Pelayanan dan pembayaran pajak dan retribusi daerah non tunai;
- Optimalisasi Pengawasan;
- Optimalisasi sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media social;
- Pemberian reward kepada wajib Pajak PBB-P2 yang membayar dalam bulan panutan, Wajib Pungut hotel restoran yang membayar tepat waktu dan sesui omzet ;
- Optimalisasi penagihan.

Guna mendukung tercapainyanya tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah didukung dengan pendanaan dari APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.7

Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/SubKegiatan (Output)	KINERJA			ANGGARAN	REALISASI	%
		TARGET	REALISASI	%			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	90 %	81,42 %	90,47	13.266.969.800,00	5.170.140.466,00	38,97
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang selesai	13 Dok	10 Dok	76,92	40.260.100,00	33.385.000,00	82,92
SubKeg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	6 Dok	5 Dok	83,33	20.381.300,00	18.215.000,00	89,37
SubKeg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	7 Dok	6 Dok	85,71	19.878.800,00	15.170.000,00	76,31
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Keuangan yang selesai	71 Dok	101 Dok	142,25	10.676.582.850,00	3.689.557.726,00	34,56
SubKeg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang	37 Orang	82,22	10.622.025.850,00	3.662.334.226,00	34,48
SubKeg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	100,00	4.605.000,00	4.593.000,00	99,74
SubKeg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester	25 Laporan	18 Laporan	72,00	49.952.000,00	22.630.500,00	45,30
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	1 Dok	1 Dok	100,00	24.338.000,00	13.240.500,00	54,40

SubKeg. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Dok	1 Dok	100,00	24.338.000,00	13.240.500,00	54,40
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Dok	9 Dok	75,00	176.384.500,00	160.168.000,00	90,81
SubKeg. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	44 Orang	36 Orang	81,82	35.200.000,00	26.586.000,00	75,53
SubKeg. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dok	8 Dok	66,67	4.961.500,00	3.687.000,00	74,31
SubKeg. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi Peraturan perundang-undangan	63 Orang	54 Orang	85,71	136.223.000,00	129.895.000,00	95,35
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	administrasi umum yang dilaksanakan	12	9	75,00	596.500.500,00	344.579.498,00	57,77
SubKeg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	Paket				
SubKeg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	90 Buah	65 Buah	72,22	150.000.000,00	116.977.638,00	77,99
SubKeg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket logistik kantor yang tersedia	60 Paket	52 Paket	86,67	74.999.500,00	46.376.165,00	61,84
SubKeg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	118.096 paket	88572 paket	75,00	46.998.900,00	27.221.655,00	57,92
SubKeg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	1.120 Lembar	830 Lembar	74,11	4.200.000,00	2.650.000,00	63,10
SubKeg. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas tamu yang terdia	12 Laporan	9 Laporan	75,00	9.970.000,00	6.058.680,00	60,77
SubKeg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi	12 Laporan	9 Laporan	75,00	235.354.000,00	97.030.060,00	41,23
SubKeg. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah penatausahaan arsip dinamis	12 Dok	9 Dok	75,00	74.978.100,00	48.265.300,00	64,37
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan barang milik daerah yang diadakan	2 Unit	1 Unit	50,00	639.024.250,00	261.032.000,00	40,85
SubKeg. Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Pengadaan Mebel yang disediakan	50 Unit	187	374,00	109.187.250,00	107.335.000,00	98,30
SubKeg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	15 Unit	14 Unit	93,33	529.837.000,00	153.697.000,00	29,01
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa penunjang yang dilaksanakan	3 jasa	3 Jasa	100,00	736.340.700,00	493.182.762,00	66,98
SubKeg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	9 Laporan	75,00	5.000.000,00	2.338.000,00	46,76

SubKeg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi dan listrik yang tersedia	12	Laporan	9	Laporan	75,00	206.100.000,00	140.835.349,00	68,33
SubKeg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terbayar	12	Laporan	9	Laporan	75,00	525.240.700,00	350.009.413,00	66,64
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan yang dipelihara	52	Unit	37	Unit	71,15	377.538.900,00	174.994.980,00	46,35
SubKeg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	19	Unit	15	Unit	78,95	195.078.900,00	88.927.580,00	45,59
SubKeg. Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	10	Unit	5	Unit	50,00	3.500.000,00	1.500.000,00	42,86
SubKeg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	22	Unit	16	Unit	72,73	125.000.000,00	35.595.900,00	28,48
SubKeg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	1	Unit	100,00	53.960.000,00	48.971.500,00	90,76
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang membayar tepat waktu	667.000	WP	612.323	WP	91,80	4.413.545.900,00	1.922.107.664,00	43,55
	Jumlah Wajib Pajak Baru	2.000	WP	1746	WP	87,30			
	Prosentase Realisasi Pajak Daerah	100	%	74,1	%	74,10			
	Prosentase Realisasi Retribusi Daerah yang dikelola	100	%	6,86	%	6,86			
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang membayar tepat waktu	667.000	WP	612.323	WP	91,80	4.413.545.900,00	1.922.107.664,00	43,55
	Jumlah Wajib Pajak Baru	2.000	WP	1746	WP	87,30			
	Prosentase Realisasi Pajak Daerah	100	%	74,1	%	74,10			
	Prosentase Realisasi Retribusi Daerah yang dikelola	100	%	6,86	%	6,86			
SubKeg. Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Objek Pajak Baru	3	Dok	3	Dok	100,00	250.000.000,00	6.553.500,00	2,62
SubKeg. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen hasil analisa Pajak dan Retribusi Daerah	1	Dok	1	Dok	100,00	140.000.000,00	20.652.550,00	14,75
SubKeg. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Penyuluhan Kebijakan Pajak Daerah yang dilaksanakan	12	Laporan	9	Laporan	75,00	270.000.000,00	153.997.900,00	57,04
SubKeg. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah jenis sarana dan prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	25	Jenis	25	Jenis	100,00	438.676.800,00	383.031.602,00	87,32
SubKeg. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	12	Laporan	9	Laporan	75,00	241.323.000,00	82.173.400,00	34,05

SubKeg. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	2	Laporan		Laporan	0,00	332.000.000,00	11.333.000,00	3,41
SubKeg. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Penilaian PBB-P2 dan BPHTB	3.000	OP	7192	OP	239,73	62.281.000,00	28.268.737,00	45,39
SubKeg. Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	24	Dok	18	Dok	75,00	184.225.000,00	105.366.600,00	57,19
SubKeg. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	35.000	Layanan	14844	Layanan	42,41	115.000.000,00	48.873.300,00	42,50
SubKeg. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Capaian Penerimaan Pajak Daerah	12	Dok	9	Dok	75,00	1.315.727.000,00	726.346.300,00	55,20
SubKeg. Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan penagihan pajak daerah	12	Dok	9	Dok	75,00	551.996.000,00	89.641.995,00	16,24
SubKeg. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	12	Dok	9	Dok	75,00	49.937.200,00	20.451.740,00	40,95
SubKeg. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12	Dok	9	Dok	75,00	321.704.900,00	127.075.000,00	39,50
SubKeg. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12	Laporan	9	Laporan	75,00	140.675.000,00	118.342.040,00	84,12

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Indikator capaian Program Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) target 90% realisasi 81,42% sehingga capaian kinerja 90,47%. Dan penyerapan Anggaran sebesar Rp5.170.140.466,00 atau 38,97% dari anggaran Rp13.266.969.800,00.

   Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan sebagai berikut :

   1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

   Indikator Kegiatan ini yaitu Jumlah dokumen Perencanaan dan Dokumen laporan Evaluasi Kinerja dengan target kinerja 13 dokumen realisasi 10 Dokumen sehingga capaian kinerja 76,92%. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran sebesar Rp33.385.000,00 atau 82,92% dari target sebesar Rp40.260.100,00,-. Kegiatan ini terdiri dari :

1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, indikator Jumlah Dokumen yang disusun dengan target 6 dokumen realisasi 5 dokumen capaian kinerja 83,33% yaitu

- Renja Perubahan Tahun 2024,
- Renstra 2024 – 2026,
- Renja Tahun 2026,
- DPA TA 2024,
- RKA P Tahun Anggaran 2024,

Dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp18.215.000,00 atau 89,37% dari target anggaran sebesar Rp20.381.300,00

1.1.2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, indikator jumlah dokumen yang disusun dengan target 7 dokumen realisasi 6 dokumen capaian 85,71% terdiri dari :

- Laporan Evaluasi tribulan 3 dokumen
- Laporan Evaluasi Internal 3 Dokumen

dan realisasi anggaran Rp 15.170.000,00 atau 76,31% dari target anggaran sebesar Rp19.878.800,00

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Indikator kegiatan ini yaitu Jumlah dokumen Keuangan yang selesai dengan target 71 dokumen yaitu Laporan Keuangan Akhir Tahun, Laporan bulanan Pengeluaran dan penerimaan, Laporan semesteran, dengan realisasi 101 dokumen, sehingga capaian kinerja tercapai 142,25%, sedangkan untuk Realisasi Anggaran sebesar Rp3.689.557.726,00,- atau 34,56% dari target anggaran sebesar Rp 10.676.582.850,00,- kegiatan ini terdiri dari :

1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Indikator Jumlah Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 37 orang dengan capaian 82,22%, realisasi anggaran sebesar Rp3.662.334.226,00 atau 34,48% dari target anggaran sebesar Rp10.622.025.850,00,- adanya mutasi ASN.

1.2.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Indikator Jumlah Laporan Keuangan yang disusun sebanyak 1 Laporan yaitu Laporan Keuangan SKPD

Tahun 2024 dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.593.000,00,- atau 99,74% dari target anggaran sebesar Rp4.605.000,00,-

1.2.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD, Indikator jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester dengan target 25 Laporan realisasi 18 Laporan dengan capaian 72,00% yang terdiri :

- Laporan Fungsional, administratif penerimaan dan pengeluaran
- Laporan semesteran
- Laporan fisik dan anggaran

realisasi anggaran Rp22.630.500,00 dari target anggaran sebesar Rp49.952.000,00,- sehingga mencapai 45,30%.

1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

Indikator Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah terealisasi 100% dari target kinerja 1 dokumen yaitu buku Inventaris barang dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp13.240.500,00,- atau 54,40% dari target anggaran sebesar Rp24.338.000,00,- kegiatan ini mempunyai 1 sub kegiatan yaitu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target kinerja 12 Dokumen, realiasi 9 Dok sehingga capaian 75%, realisasi anggaran sebesar Rp160.168.000,00,- atau 90,81% dari target anggaran sebesar Rp176.384.500,00, kegiatan ini terdiri dari:

1.4.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, Indikator jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya dengan target kinerja 44 orang, realisasi 36 orang sehingga capaian kinerja 81,82% dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp26.586.000,00,- atau 75,53% dari target anggaran sebesar Rp 35.200.000,00,-

1.4.2 Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Indikator Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan target kinerja 12 Dokumen, realisasi 8 Dokumen sehingga capaian kinerja 66,67% dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp3.687.00,00,- atau 74,31% dari target anggaran Rp4.961.500,00,-

1.4.3 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, Indikator Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi Peraturan perundang-undangan dengan target kinerja 63 Orang, realisasi 54 Orang sehingga capaian kinerja 85,71% dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp129.895.000,00,- atau 95,35% dari target anggaran Rp136.223.000,00,-

1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Indikator jumlah Laporan administrasi umum dengan target kinerja 12 laporan, realisasi 9 laporan sehingga capaian 75%, realisasi anggaran sebesar Rp344.579.498,00,- atau 57,77% dari target anggaran sebesar Rp596.500.500,00, kegiatan ini terdiri dari :

1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga, Indikator Jumlah Peralatan rumah tangga yang tersedia dengan target kinerja 90 paket, realisasi 65 paket, sehingga capaian kinerja 72,22% dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp116.977.638,00,- atau 77,99% dari target anggaran sebesar Rp150.000.000,00,-

1.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor, Indikator jumlah logistik kantor yang tersedia, dengan target 60 paket, realisasi 52 paket, sehingga capaian kinerja 86,67% dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp46.376.165,00,- atau 61,84% dari target anggaran sebesar Rp74.999.500,00,-

1.5.3 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Indikator jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang tersedia dengan target kinerja 118.096 paket, realisasi 88.572 paket sehingga capaian kinerja 75% dan untuk realisasi anggaran

sebesar Rp27.221.655,00,- atau 57,92% dari target anggaran sebesar Rp46.998.900,00,-

1.5.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Indikator jumlah bahan bacaan yang tersedia dengan target kinerja 1.120 Lembar, realisasi 830 Lembar, sehingga capaian kinerja 74,11% dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp2.650.000,00 atau 63,10% dari target anggaran sebesar Rp4.200.000,00,-

1.5.5 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, Indikator jumlah laporan fasilitas tamu dengan target kinerja 12 laporan terealisasi 9 laporan sehingga capaian kinerja 75,00% dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp6.058.680,00,- atau 60,77% dari target anggaran sebesar Rp9.970.000,00,-

1.5.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Indikator jumlah laporan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dengan target kinerja 12 laporan terealisasi 9 laporan sehingga capaian kinerja 75,00% dan untuk realisasi anggaran Rp97.030.060,00,- atau 41,23% dari target anggaran sebesar Rp235.354.000,00,-

1.5.7 Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, Indikator jumlah penatausahaan arsip dinamis dengan target kinerja 12 dokumen terealisasi 9 dokumen sehingga capaian kinerja 75,00% dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp48.265.300,00,- atau 64,37% dari target anggaran sebesar Rp74.978.100,00,-

1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Indikator Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan dengan target kinerja 2 unit terealisasi 1 unit sehingga capaian kinerja 50,00% dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp261.032.000,00,- atau 40,85% dari target anggaran sebesar Rp639.024.250,00,- kegiatan ini terdiri dari :

1.6.1 Sub kegiatan Pengadaan Mebel, Indikator Jumlah Unit Pengadaan Mebel yang disediakan dengan target 50 Unit realisasi 187 Unit sehingga capaian kinerja 374,00% dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp107.335.000,00 atau 98,30% dari target anggaran sebesar Rp109.187.250,00 dan rincian pengadaan sebagai berikut :

No	Nama barang	Jml. Brg
1	Meja	19 Unit
2	Kursi Staff	15 Unit
3	Kursi Raung Rapat	153 Unit
	JUMLAH	187 Unit

1.6.2 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Indikator Jumlah Unit pengadaan peralatan dan mesin kantor dengan target 15 realisasi 16 Unit sehingga capaian kinerja 106,67% dengan anggaran sebesar Rp529.837.000,00,- terealisasi Rp153.697.000,00,- atau 29,01% dan rincian pengadaan sebagai berikut :

No	Nama barang	Jml. Brg
1	Standing Dispenser	2 Unit
2	Kamera Mirrorless	1 Unit
3	Komputer PC	5 Unit
4	Printer Laser	4 Unit
5	Printer Tinta	3 Unit
6	Printer PBB	1 Unit
	JUMLAH	16 Unit

1.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan dengan capaian kinerja 100% dari target kinerja 3 Jasa yaitu Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp493.182.762,00 atau 66,98% dari target anggaran sebesar Rp736340700,00, kegiatan ini terdiri dari:

1.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Indikator jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat dengan target kinerja 12 laporan terealisasi 9 laporan sehingga capaian kinerja 75%, digunakan untuk pembelian materai, biaya kirim surat tercatat, sedangkan untuk realisasi anggaran sebesar Rp2.338.000,00,- atau 46,76% dari target anggaran sebesar Rp 5.000.000,00,-

1.7.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, indikator jumlah jasa komunikasi dan listrik dengan target kinerja 12 laporan terealisasi 9 laporan sehingga capaian kinerja 75%, hal ini digunakan untuk pembayaran listrik, Air, Telepon dan Air, sedangkan untuk realisasi anggaran sebesar Rp140.835.349,00,- atau 68,33% dari target anggaran sebesar Rp206.100.000,00,-

1.7.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Indikator jumlah jasa pelayanan umum kantor dengan target kinerja 12 laporan terealisasi 9 laporan sehingga capaian kinerja 75%, hal ini digunakan untuk pembayaran Honorarium PPK, Bendahara, Tenaga harian lepas, jasa tenaga kebesihan, sedangkan untuk realisasi anggaran sebesar Rp 350.009.413,00,- atau 66,64% dari target anggaran sebesar Rp525.240.700,00,-

1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara dengan target kinerja 52 Unit realisasi 37 Unit sehingga capaian kinerja 71,15% dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp174.994.980,00 atau 46,35% dari target anggaran sebesar Rp377.538.900,00, kegiatan ini terdiri dari :

1.8.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya dengan target kinerja 19 Unit realisasi 15 Unit sehingga

capaian kinerja 78,95. Pemeliharaan kendaraan dinas ini diantaranya untuk pembelian BBM, Hergetasi, jasa kalibrasi (KIR) dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp88.927.580,00 atau 45,59% dari target anggaran sebesar Rp195.078.900,00

1.8.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel, indikator jumlah mebel yang dipelihara dengan target kinerja 10 unit terealisasi 5 unit sehingga capaian kinerja 50% dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp1.500.000,00 atau 42,86% dari target anggaran sebesar Rp3.500.000,00

1.8.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Indikator jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan target kinerja 22 Unit terealisasi 16 Unit sehingga capaian kinerja 72,73% diantara untuk pemeliharaan computer, Printer, AC, Mesin Foto copy, latop, sedangkan untuk realisasi anggaran sebesar Rp35.595.900,00 atau 28,48% dari target anggaran sebesar Rp125.000.000,00

1.8.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Indikator jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi terealisasi 100% dari target kinerja 1 gedung kantor Bapenda Kabupaten Nganjuk dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp48.971.500,00 atau 90,76% dari target anggaran sebesar Rp53.960.000,00

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Indikator capaian Program jumlah wajib pajak yang membayar tepat waktu terealisasi 612.323 WP dari target 667.000 WP atau 91,80%, Indikator Jumlah Wajib Pajak Baru terealisasi 1.746 WP dari Target 2000 WP, Indikator Prosentase Realisasi Pajak Daerah terealisasi 74,1% dari target 100% dan Indikator Prosentase Realisasi Retribusi Daerah yang dikelola terealisiasi 6,86% dari target 100%. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 Kegiatan dan 14 Sub Kegiatan sebagai berikut :

2.1 Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Indikator jumlah Objek Pajak Baru terealisasi 3 dokumen atau 100% dari target

kinerja 3 dokumen dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp6.553.500,00 atau 2,62% dari target anggaran sebesar Rp250.000.000,00

2.2 Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, Indikator Jumlah Dokumen hasil analisa Pajak dan Retribusi Daerah target kinerja 1 Dokumen terealisasi 1 Dokumen atau 100% sedangkan untuk realisasi anggaran sebesar Rp20.652.550,00 atau 14,75% dari target anggaran sebesar Rp140.000.000,00

2.3 Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, Indikator jumlah penyuluhan kebijakan pajak daerah yang dilaksanakan dengan target kinerja 12 laporan terealisasi 9 laporan atau 75% . Penyuluhan yang telah dilaksanakan berupa langsung, media sosial dan banner, sedangkan untuk realisasi anggaran sebesar Rp153.997.900,00 atau 57,04% dari target anggaran sebesar Rp270.000.000,00

2.4 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah, Indikator Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah terealisasi 25 jenis dari target kinerja 25 jenis sarana sehingga capaian kinerja 100% seperti Buku bantu blok, Logo DHKP, sampul DHKP,SPPT, Spop dan L SPOP, SPTPD Reklame, restoran, Parkir, Minerba, Hiburan, kupon Undian dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp383.031.602,00 atau 87,32% dari target anggaran sebesar Rp438.676.800,00

2.5 Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Indikator Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah terealisasi 12 laporan atau 75% dari target kinerja 9 laporan dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp82.173.400,00 atau 34,05% dari target anggaran sebesar Rp241.323.000,00

2.6 Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah, Indikator Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dan untuk

realisasi anggaran sebesar Rp11.333.000,00 atau 3,41% dari target anggaran sebesar Rp332.000.000,00

2.7 Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Indikator jumlah penilaian PBB-P2 dan BPHTB terealisasi 7.192 OP atau 239,73% dari target kinerja 3.000 OP dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp28.268.737,00 atau 45,39% dari target anggaran sebesar Rp62.281.000,00 dikarenakan dalam proses pelayanan PBB –P2 dan BHPTB sudah secara online dan sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan sehingga dalam proses penilaian PBB-P2 dan BPHTB dilakukan melalui Sistem yaitu E SPPT dan E BPHTB yang mengakibatkan penilaian yang ke lapangan sudah sangat berkurang.

2.8 Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah, Indikator Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah terealisasi 24 dokumen atau 75% dari target 18 dokumen dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp105.366.600,00 atau 57,19% dari target anggaran sebesar Rp184.225.000,00, dikarenakan kegiatan untuk penyerahan SPPT secara simbolis tidak jadi dilaksanakan sehubungan dengan banyaknya desa yang minta segera didistribusikannya SPPT PBB-P2 ke Desa.

2.9 Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah, Indikator Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah dan konsultasi terealisasi 14.844 Layanan atau 42,41% dari target kinerja 35.000 Layanan dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp48.873.300,00 atau 42,50% dari target anggaran sebesar Rp115.000.000,00

2.10 Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, Indikator jumlah capaian Penerimaan Pajak Daerah terealisasi 75% dari target kinerja 12 laporan dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp726.346.300,00 atau 55,20% dari target anggaran sebesar Rp1.315.727.000,00.

2.11 Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah, Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah terealisasi 12 dokumen atau 75% dari target 9 dokumen dan untuk realisasi anggaran sebesar

Rp89.641.995,00 atau 16,24% dari target anggaran sebesar Rp551.996.000,00

2.12 Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah, Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah yang selesai terealisasi 9 dokumen atau 75% dari target kinerja 10 dokumen dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp20.451.740,00 atau 40,95% dari target anggaran sebesar Rp49.937.200,00, dikarenakan pengajuan pengurangan pajak daerah berkurang sehingga juga tidak melakukan pengecekan lapangan yang menyebabkan realisasi perjalanan dinas dalam kota tidak maksimal.

2.13 Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah, Indikator Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah terealisasi 9 dokumen atau 75% dari target kinerja 12 dokumen dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp127.075.000,00 atau 39,50% dari target anggaran sebesar Rp321.704.900,00

2.14 Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, Indikator Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah terealisasi 9 laporan atau 75% dari target kinerja 12 laporan dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp118.342.040,00 atau 84,12% dari target anggaran sebesar Rp140.675.000,00

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD (sesuai perda SOTK) terdiri dari :

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pearangkat daerah kabupaten Nganjuk mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendapatan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis usrusan pemerintahan dibidang Pendapatan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugasnya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk difokuskan pada pelayanan pendapatan daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadai dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan sebagaimana table berikut :

Tabel 2.8

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Lambatnya Peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah	Penetapan target PAD belum sepenuhnya melalui kajian yang obyektif	Pemutakhiran Data Potensi PAD belum optimal
			Belum ada database acuan penetapan harga transaksi BPHTB yang obyektif dan transparan
		Kinerja pemungutan PAD kurang optimal data dukung	Kurang Optimalnya tim pemungutan PAD
			Kurangnya Kepatuhan membayar Pajak
			Terbatasnya dukungan operasional Kecamatan, Kelurahan untuk membantu pemungutan PAD
			Tidak adanya insentif bagi OPD penghasil retribusi
		Kualitas pelayanan belum sepenuhnya memuaskan masyarakat	Digitalisasi layanan pajak belum optimal
			Kurangnya kemudahan dalam pelayanan pajak Lambatnya waktu penyelesaian layanan
		Kurang Optimalnya Pengendalian dan Pengawasan PAD	Penegakan sanksi wajib pajak dan aparatur pajak yang melanggar regulasi pajak kurang optimal

			Belum efektifnya sistem pengawasan penyimpangan pajak

2.3.3 Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati nganjuk serta Program Nasional/Internasional yang mencakup Standar Pelayanan Minimal dam tujuan pembangungan berkelanjutan (SDG'S) Sesuai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, ditetapkan visi pembangunan Kabupaten Nganjuk yaitu ***"Nganjuk yang maju, adil dan sejahtera"*** Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien disusunlah misi Kabupaten Nganjuk, yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat Nganjuk yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika dan berbudaya;
2. Mewujudkan Nganjuk yang berdaya saing;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan,
4. Mewujudkan masyarakat yang demokratis, berlandaskan hukum yang didukung oleh profesionalisme aparatur;
5. Mewujudkan Nganjuk yang aman, tentram, tertib, dan damai;
6. Mewujudkan Nganjuk yang asri, nyaman dan lestari,

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai garda depan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan sub urusan pendapatan daerah memberikan kemudahan dalam rangka mendukung misi ke 4 (empat) Kabupaten Nganjuk yaitu "4. "Mewujudkan masyarakat yang demokratis, berlandaskan hukum yang didukung oleh profesionalisme aparatur;".

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Dalam meningkatkan pelayanan bidang keuangan sub urusan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk terdapat tantangan dan peluang.

- Tantangan yang dihadapi antara lain:
  1. Penyediaan Sumber Daya Manusia pemungut PAD yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
  2. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah khususnya penerimaan Pajak dan retribusi daerah

3. Penyusunan regulasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan regulasi yang berlaku
4. Sinergitas program kegiatan perangkat daerah guna menciptakan daya ungkit penerimaan PAD.

- PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Peluang yang dihadapi dalam pada tahun 2025, pengembangan untuk pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat potensi PAD yang belum tergali secara optimal sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang harus terus ditingkatkan.
2. Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah Penghasil
3. Evaluasi Peraturan Daerah yang tidak sesuai dengan kondisi daerah untuk peningkatan sumber pendapatan daerah dengan memanfaatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah
4. Sosialisasi kepada seluruh masyarakat tentang arti pentingnya pajak dan retribusi daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Madiun.
5. Perbaikan system, prosedur dan tata kerja pemungutan pendapatan asli daerah.
6. Adanya Obsen PKB dan BBNKB yang menyebabkan kenaikan Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak daerah

2.3.5 **Isu-isu penting dan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan.**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2024 -2026 isu- isu penting dan strategis untuk mengatasi permasalahan pada tahun 2026 antara lain :

1. Aparatur pelayanan pajak dan retribusi yang berintegritas, profesional dan memadai jumlah dan kompetensinya.
2. Digitalisasi pengelolaan dan pelayanan pajak dan retribusi

3. Dukungan operasional kelurahan dan kecamatan dalam membantu pendataan, pemungutan dan pelayanan pajak dan retribusi
4. Insentif OPD penghasil retribusi
5. Sinergitas Pemkab dan Pemprov dalam pengelolaan pajak daerah

2.4 Review Terhadap Rencana Awal RKPD

Proses reviu rancangan awal RKPD Tahun 2025 adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2025 dengan analisis kebutuhan. Temuan proses reviu tersebut berupa identifikasi rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan yang sesuai namun besarannya berbeda, sebagaimana disajikan tabel berikut:

Tabel 2.4
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2026

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					RANCANGAN AKHIR RKPD					
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Bapenda				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Bapenda				
	KEUANGAN					KEUANGAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	90%	17.750.654.821	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	90%	16.856.658.774	
			Nilai sakip	A				Nilai sakip	A		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah dan Evaluasi perangkat daerah yang disusun	13 dokumen	40.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah dan Evaluasi perangkat daerah yang disusun	13 dokumen	39.970.000	

01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	20.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	19.995.000	
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi perangkat daerah	7 Laporan	20.000.000	Jumlah Laporan Evaluasi perangkat daerah		Jumlah Evaluasi perangkat daerah	7 Laporan	19.975.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah Laporan Keuangan yang selesai**	**19 Laporan**	**15.140.854.821**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Laporan Keuangan yang selesai**	**19 Laporan**	**14.250.539.300**	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang	15.082.354.821	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang	14.192.169.300	
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	8.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	8.432.000	
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	18 laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	18 laporan	49.938.000	

			Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD					Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD			
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah yang disusun**	**1 laporan**	**25.000.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah yang disusun**	**1 laporan**	**25.000.000**	
06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	1 laporan	25.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	1 laporan	25.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Laporan Tingkat kehadiran ASN**	**12 Dokumen**	**331.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Laporan Tingkat kehadiran ASN**	**12 Dokumen**	**328.353.800**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	44 Orang	51.000.000				44 Orang	56.952.000	
03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 Dokumen	5.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 Dokumen	4.999.800	

09	Bimbingan Teknis Implemetasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	48 Orang	275.000.000	Bimbingan Teknis Implemetasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	48 Orang	266.402.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah laporan Administrasi Umum yang dilaksanakan**	**12 Paket**	**560.400.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan Administrasi Umum yang dilaksanakan**	**12 Paket**	**630.875.690**	
01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	150.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	187.083.100	
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	60 paket	75.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	60 paket	101.374.440	
05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	118.096 lembar	50.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	118.096 lembar	49.999.900	
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1120 dokumen	5.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1120 dokumen	5.400.000	

08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	10.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	9.998.250	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	207.020.000	
10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 Dokumen	70.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 Dokumen	70.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah unit pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan**	**22 unit**	**300.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah unit pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan**	**22 unit**	**367.699.934**	
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 unit	300.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 unit	367.699.934	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan**	**3 Jasa**	**961.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan**	**3 Jasa**	**912.738.700**	

01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	6.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	15.000.000	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	275.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	241.700.000	
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	680.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	656.038.700	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang dipelihara**	**52 unit**	**392.400.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang dipelihara**	**52 unit**	**301.481.350**	
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar Pajaknya	20 unit	200.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar Pajaknya	19 unit	199.723.850	
05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebel yang dipelihara	17 unit	2.500.000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebel yang dipelihara	17 unit	2.497.500	

06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	22 unit	150.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	22 unit	59.300.000	
09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	39.900.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	39.960.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		**Jumlah Wajib Pajak yang membayar tepat Waktu**	**667.000 WP**	**5.840.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**		**Jumlah Wajib Pajak yang membayar tepat Waktu**	**667.000 WP**	**7.486.605.500**	
			Jumlah Wajib Pajak Baru	2500 WP				Jumlah Wajib Pajak Baru	2500 WP		
			Prosentase Realisasi Pajak Daerah	100,00%				Prosentase Realisasi Pajak Daerah	100,00%		
			Prosentase Realisasi Retribusi Daerah yang dikelola	100,00%				Prosentase Realisasi Retribusi Daerah yang dikelola	100,00%		
	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		**Jumlah Wajib Pajak yang membayar tepat Waktu**	**667.000 WP**	**5.840.000.000**	**KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**		**Jumlah Wajib Pajak yang membayar tepat Waktu**	**667.000 WP**	**7.486.605.500**	
01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah		Jumlah Dokumen Rencana pengelolaan pajak daerah	3 Dokumen	150.000.000	Perencanaan pengelolaan pajak daerah		Jumlah Dokumen Rencana pengelolaan pajak daerah	3 Dokumen	418.300.700	

02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah dokumen Hasil analis Pajak Daerah	1 Dokumen	100.000.000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah dokumen Hasil analis Pajak Daerah	1 Dokumen	396.006.000	
03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	350.000.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	842.120.000	
04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah yang tersedia	25 jenis	500.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah yang tersedia	25 jenis	500.000.000	
05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	450.000.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	400.000.000	
06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan	250.000.000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan	250.000.000	

07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	3.000 OP	75.000.000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	3.000 OP	75.000.000	
08	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	24 dokumen	220.000.000	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	24 dokumen	200.000.000	
09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2 Layanan	100.000.000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2 Layanan	100.000.000	
10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	1.800.000.000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	1.800.000.000	
11	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	1.200.000.000	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	1.865.178.800	
12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 Dokumen	70.000.000	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 Dokumen	70.000.000	

13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	375.000.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	370.000.000	
15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan	200.000.000	Elektronifikasi Transaksi Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan	200.000.000	
					23.590.654.821,00					**24.343.264.274,00**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk Badan Pendapatan daerah kabupaten Nganjuk tidak ada usulan sehingga tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Nganjuk
Badan Pendapatan Daerah

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	NIHIL	-	-	-	-

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional mengacu Nawa cita yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat daerah Tahun 2025 2029 masuk dalam unsur Keuangan dengan tujuan terwujudnya pengelolaan keuangan dan asset daerah yang transparan dan akuntabel dengan indicator Opini BPK Atas laporan Keauangan dengan Program Pengelolaan Pendapatan daerah Outcome program :

1. Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan Indikator Persentase PAD terhadap Pendapatan daerah
2. Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan indicator Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan
3. Meningkatnya penerapan system informasi keuangan berbasis digital indicator Persentase penerapan Sistem Informasi Keuangan berbasis digital.

Reformasi tata kelola pemerintahan juga didukung oleh transformasi digital dan inklusivitas pelayanan publik yang dilaksanakan melalui

(1) menciptakan pemerintahan yang berbasis digitalisasi untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien;
(2) Digitalisasi pelayanan publik;
(3) Pengembangan talenta digital pelayanan publik;
(4) Penguatan ekosistem digital pelayanan publik; dan
(5) Perluasan akses pelayanan publik.

Di samping itu, tata kelola pemerintahan juga mencakup reformasi tata kelola keuangan negara, yang diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai landasan transformasi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045, melalui :

(1) Optimalisasi pendapatan negara,

(2) Optimalisasi belanja negara, dan

(3) Perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan.

Optimalisasi Pendapatan Negara ditujukan untuk penerimaan perpajakan dan non-perpajakan sehingga dapat menyediakan ruang fiskal yang lebih memadai untuk mencapai sasaran pembangunan. Dari sisi perpajakan, upaya yang dilakukan mencakup :

(a) ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan yang didukung oleh penguatan kelembagaan penerimaan negara

(b) percepatan implementasi core tax system dengan mengoptimalkan pengelolaan data yang berbasis risiko dan interoperabilitas data;

(c) pengembangan sistem perpajakan lebih sesuai dengan perubahan struktur perekonomian;

(d) Optimalisasi pengumpulan pajak atas Wajib Pajak berpendapatan tinggi;

(e) peningkatan kepatuhan pajak melalui penegakan hukum dan digitalisasi;

(f) penajaman insentif pajak untuk mendorong pengembangan sektor prioritas dalam rangka transformasi ekonomi, antara lain pembebasan pajak penghasilan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam 3 tahun pertama.

Selain itu, upaya peningkatan penerimaan perpajakan juga dilakukan di daerah sejalan dengan implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, antara lain didukung oleh Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah serta penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan.

Dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2026 menuntut upaya konkrit, dengan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah yang secara langsung memiliki relevansi terhadap tema pembangunan nasional dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk mengacu pada visi RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Nganjuk yang berbunyi *"Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju Sejahtera dan Bermartabat"*. tertuang dalam Misi Ke 2 Meningkatkan Kinerja Birokrasi yang Bersih, Profesional

dan Akuntabel demi Masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan Efesien melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Aspiratif, Parsitipatif dan Transparan *dengan* tujuan masuk pada nomor 1 yaitu Meningkatnya tatakelola Pemerintahan daerah yang akuntabel dan sasarannya Meningkatnya transformasi dan kapasitas fiskal daerah dengan Indikator *Rasio kapastas fiskal daerah*

- **Tujuan**

  Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Renstra Tahun 2025-2029 yaitu *"Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah"*, indikator Persentase PAD terhadap Pendapatan yang rumusan perhitungannya adalah Realisasi Pendapatan Asli Daerah dibanding realisasi Pendapatan Daerah dikali 100%.

- **Sasaran**

  Sesuai dengan Renstra Tahun 2025-2029 Sasaran Bapenda Kabupaten Ngajuk :

  1. Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Indikator Persentase kenaikan pajak daerah dan retribusi daerah
  2. Meningkatnya Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah dan lain-lain PAD yang sah dengan Indikator Persentase Kenaikan Penerimaan hasil kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Pengelolaan Pendapatan daerah dengan Outcome :

1. Meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak/wajib pungut/Wajib Retribusi dengan Indikator Prosentase Kepatuhan Wajib Pajak/Retribusi/Wajib Pungut
2. Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah dengan Indikator Presentase Peningkatan Subyek/Obyek Pajak Daerah yang Dimutakirkan
3. Meningkatnya Penerapan Sistem Informasi Pajak Daerah berbasis Digital dengan Indikator Indeks Elektronifikasi Pemerintah Daerah
4. Meningkatnya Deviden atas peyertaan Modal pada BUMD dengan Indikator Prosentase Realisasi Deviden

5. Meningkatnya Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang sah dengan Indikator Presentase Realisasi Lain-lain PAD yang sah.

Tabel 3.1
Tujuan dan sasaran Bapenda Kabupaten Nganjuk

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2026
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Prosentase PAD terhadap Pendapatan	20,47
	Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah dan retribusi Daerah	Presentase Kenaikan Pajak Daerah dan Retribusi daerah	2,77
	Meningkatnya Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah dan lain-lain PAD yang sah	Presentase Kenaikan penerimaan hasil kekayaan Daerah dan lain-lain PAD yang sah	1,68

Sedangkan Penetapan target penerimaan pajak dan retribusi daerah Tahun 2026 yang mempertimbangkan:

1. Kebijakan makro ekonomi daerah serta potensi pajak dan retribusi daerah;
2. Kebijakan makro ekonomi daerah meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah. Kebijakan makro ekonomi daerah diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang mendasari penyusunan APBN; dan
3. Target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan melalui keputusan kepala daerah dan menjadi bagian dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah pada penyusunan APBD
4. Penganggaran atas potensi pajak daerah dan retribusi daerah dihitung dengan memperhatikan hasil pendataan potensi pajak daerah dan retribusi daerah, serta tarif yang telah ditetapkan dalam Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024.

5. Target Opsen PKB, target Opsen BBNKB, dan target Opsen MBLB sebagai berikut:
   1). Target Opsen PKB pada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dengan memperhatikan hasil pendataan kendaraan bermotor dan tren besaran alokasi bagi hasil pemerintah provinsi kepada kabupaten berkenaan 3 tahun sebelumnya;
   2) Target Opsen BBNKB pada pemerintah kabupaten Nganjuk dianggarkan dengan memperhatikan tren besaran alokasi bagi hasil pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota berkenaan 3 tahun sebelumnya; dan
   3) Target Opsen MBLB pada pemerintah provinsi dianggarkan dengan memperhatikan target pajak MBLB pada pemerintah kabupaten/kota.

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk dalam mengimplemetasikan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik menyusun program dan kegiatan untuk tahun 2026 serta merupakan perwujudan dari upaya untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk.

Pada Tahun Anggaran 2026 Badan Pendapatan Daerah melaksanakan sebanyak 2 (dua) program dan 9 (sembilan) kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp24.343.264.274,00 dengan Uraian sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

outcome Program Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator Nilai Sakip Perangkat Daerah

Program ini bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas diantaranya digunakan untuk

- menyusun perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja;
- Menyusun administrasi Keuangan daerah
- Menyusun Administrasi Barang Milik Daerah
- Menyusun Administrasi Kepegawaian
- Menyusun Administrasi Umum
- Pengadaan Barang Milik Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang
- Pemeliharaan Barang Milik daerah

Program ini terdiri dari Kegiatan sebagai berikut:

1. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah;**

Kegitan ini bertujuan untuk Menyusun perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja.

Sasaran Kegiatan ini	:	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Substansi
Indikator output	:	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah yang Ditetapkan

Kegiatan ini terdiri dari Subkegiatan sebagai berikut :

1.1. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah:

Sub kegiatan ini digunakan untuk penyusunan Renstra, Renja, Perubahan Renja, RKA, DPA, RKAP, RTP, Rencana

Aksi dan penyusunan perencanaan lainnya.

output Sub kegiatan ini : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah,

hasil dokumen perencanaan yang disusun , sehingga dengan adanya subkegiatan ini setiap program terencana dan tersusun dengan baik

1.2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan ini digunakan untuk melaksanakan laporan monitoring dan evaluasi dan kinerja perangkat diantaranya LKJiP, LKPJ, Laporan Evaluasi Renja , Laporan Evaluasi Pembangunan, Laporan evaluasi Kinerja tribulan, Evaluasi SPIP, evaluasi ZI,

Output Subkegiatan ini : Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator Output : umlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

hasil Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sehingga tercipta pola kerja yang lebih baik dan menunjang kinerja perangkat daerah yang lebih maju.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Sasaran kegiatan ini adalah :

1. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Yang Tepat Waktu dengan indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN;

2. Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Akurat dengan indikator Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun

Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

2.1 Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Subkegiatan : kegiatan diperuntukan pembayaran gaji dan

tunjangan ASN.

Output Sub kegiatan : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

2.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sub kegiatan ini digunakan untuk mendukung penyusunan laporan keuangan akhir tahun.

Output Sub kegiatan : Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD,

Indikator keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

2.3 Subkegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD

Subkegiatan ini digunakan penyusunan laporan bulanan untuk pelaporan bendahara penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/trwulan/ dan semesteran diantaranya laporan fungsional, laporan administrative, laporan pajak.

Output Subkegiatan : Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD

Indikator keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD

3. Kegiatan Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk pengadministrasian Barang Milik daerah.

Sasaran : Tersusunnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Akurat

Indicator : Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun.

Hasil dari Kegiatan ini adalah buku inventaris barang milik daerah pada SKPD, Cash opname, laporan persediaan, laporan belanja modal. Kegiatan ini terdiri dari Subkegiatan sebagai berikut :

3.1 Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Subkegiatan ini bertujuan untuk penatausahaan barang milik daerah pada SKPD.

output : Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

indikator : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

Hasil dari subkegiatan ini buku inventaris barang milik daerah pada SKPD, Cash opname, laporan persediaan, laporan belanja modal, sehingga Barang milik Daerah dapat terinventarisasi dengan baik.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk terlaksanaknya administrasi kepegawaian pada SKPD.

Sasaran Tersedianya data administrasi kepegawaian dengan indicator :

- Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian,

- Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan,
- Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta atribut kelengkapannya.

Kegiatan ini terdiri dari Subkegiatan sebagai berikut :

4.1 Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Output : Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya

Indikator : Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya.

Hasilnya adalah pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan yang tersedia.

Dengan adanya subkegiatan ini akan meningkatkan kedisiplinan ASN dalam memakai Pakaian dinas beserta atributnya.

4.2 Subkegiatan Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian

Output : Terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian Bapenda

Indicator : Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian. Dengan adanya subkegiatan ini administrasi kepegawaian tertib

4.3. Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan

Output : Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan;

Indikator : Jumlah orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan berdasarkan tugas dan fungsi.

Dengan adanya subkegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan indeks Penilaian ASN Bapenda dan juga tercipta pemahaman yang matang bagi para pegawai akan peraturan perundang-undangan

5. Kegiatan Administrasi Umum PerangkatDaerah;

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang urusan pemerintahan Daerah dengan Optimal dalam hal urusan administrasi umum Perangkat Daerah.

Sasaran :

1. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran Yang Layak Pakai

   Indikator : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan,

Sasaran dan Indikator tersebut terdiri dari Subkegiatan sebagai berikut :

5.1 Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Digunakan untuk menyediakan alat tulis kantor, peralatan listrik peralatan kebersihan, peralatan kantor dan perlengkapan kantor

Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Indikator : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

5.2 Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Digunakan untuk menyediakan makan minum harian ASN bahan kebersihan kantor, bahan kesehatan ASN

Output : Tersedianya Bahan Logistik Kantor

Indikator : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan

5.3 Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Digunakan untuk cetak kebutuhan adminstrasi kantor, cetak banner dan penggandaan berkas - berkas surat .

Output : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan.

Dengan adanya Subkegiatan ini diharapkan dpat meningkatkan kelancaran pelaksanaan administrasi dan

pelayanan masyarakat.

5.4. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Digunakan untuk berlangganan surat kabar/Koran dan menyediakan buku buku peraturan.

Output : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan

Indikator : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan.

2. Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran Yang Tepat Waktu dan Akurat

Indikator : Jumlah Laporan Penatausahaan Perkantoran yang Disusun,

Subkegiatan sebagai berikut :

5.5 Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Digunakan untuk menyediakan makan minum tamu dinas,

Output : Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu

Indikator : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu,

5.6 Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD

Digunakan untuk kebutuhan rapat, koordinasi dan konsultasi baik dalam kota maupun luar kota dan juga untuk menyediakan makan minum rapat dinas.

output : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD,

Indikator : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5.7 Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Digunakan untuk melaksanakan penataan arsip dinamis.

Output : Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Indikator : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis

pada Bapenda.

6 **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang urusan pemerintahan Daerah dengan Optimal dalam hal Pengadaan Barang Milik Daerah.

Sasaran : Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Layak Pakai

Indikator : Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disediakan,

Kegiatan ini terdiri dari subkegiatan sebagai berikut :

6.1 Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Output : Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya,

Indikator : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan,sehingga dapat memperlancar pelaksanaan tugas dan mengomptimalkan pelayan prima.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang urusan pemerintahan Daerah dengan Optimal di bidang pengadaaan jasa.

Sasaran : Tersedianya jasa pelayanan perkantoran yang memadai

Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran yang Disusun

Kegiatan ini terdiri dari subkegiatan sebagai berikut :

7.1 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Subkegiatan ini digunakan untuk pembelian materai, buku cek, pengiriman surat tercatat.

Output : Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat,

Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

7.2 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Output : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,

Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan,

7.3 Sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Output : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk memelihara Barang Milik Daerah agar dapat menunjang urusan pemerintahan Daerah dengan Optimal.

Sasaran : Terlaksananya perawatan barang milik daerah pada perangkat daerah yang layak pakai

Indikator : Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik

Kegiatan ini terdiri dari Subkegiatan sebagai berikut :

8.1 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan

Output : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan,

Indikator : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.

8.2. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

Output : Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya,

Indikator : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

8.3 Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya

Output : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya,

Indikator Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara

8.2 SubKegiatan Pemeliharaan Mebel

Output : Terlaksananya Pemeliharaan Mebel,

Indikator : Jumlah Mebel yang Dipelihara

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini digunakan untuk :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
2. Pengawasan dan pemeriksaan wajib pajak
3. Pelayanan wajib pajak daerah
4. Penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital

outcome Program sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak/Wajib Pungut/Wajib Retribusi dengan Indikator Persentase Kepatuhan Wajib Pajak/Retribusi/Wajib Pungut.

   Kegiatan , Subkegiatan pada outcome program ini :

   2.1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

   Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan capaian Pendapatan Daerah, dengan sasaran :

   1. Tersusunnya Laporan Data Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah dengan Indikator Jumlah laporan Data Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah

      Subkegiatan pada sasaran ini :

      1.1 Subkegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

      Output : Tersusunnya Laporan Data Realisasi Pajak Daerah,

      Indikator : Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi.

      Subkegiatan ini menghasilkan data realisasi

pendapatan daerah

1.2 Subkegiatan Penagihan Pajak Daerah

Output : Tersedianya data hasil Penagihan Piutang Pajak Daerah,

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah.

Subkegiatan ini menghasilan data piutang pajak daerah dan data realisasi penagihan piutang pajak pajak daerah

1.3 Subkegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana Pajak Daerah,

Indikator : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah.

Subkegiatan ini menghasilkan tersedianya blanko SPPT,blanko SPOP, LSPOP, DHKP, catridge untuk printer PBB-P2.

2. Tersusunnya Laporan Wajib Pajak/Retribusi yang membayar tepat waktu dan tepat jumlah dengan Indikator Jumlah Laporan Wajib Pajak/Retribusi yang membayar tepat waktu dan tepat jumlah

Subkegiatan pada sasaran ini :

4.1 **Subkegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah**

Output : penyusunan dokumen penyelesaian pangajuan keberatan, pajak daerah,

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah.

Subkegiatan ini menghasilkan berita acara hasil pemeriksaan untuk BPHTB, perubahan SPPT

untuk PBB-P2

4.2 **Subkeg. Pengendalian, pemeriksaan dan Pengawasan pajak Daerah**

Output : penyusunan dokumen hasil pengawasan, pemeriksanaan pajak

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah

2. Meningkatnya Upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah dengan indikator persentase peningkatan subyek/obyek pajak daerah yang dimutakhirkan.

Kegiatan , Subkegiatan pada outcome program ini :

1. Tersusunnya Laporan hasil Pemutakhiran Subyek/Obyek Pajak dan Retribusi Daerah dengan Indikator Jumlah Laporan hasil pemutkahiran Subyek/Obyek Pajak dan Retribusi Daerah yang dimutakhirkan

Sasaran kegiatan ini pada subkegiatan :

1.1 Sukegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Output : Penyusunan Laporan hasil Pendataan, Pendaftaran Obyek/Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah,

Indikator : Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah.

Subkegiatan ini menghasilan data pemuthakiran pajak daerah.

1.2 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Output : Data hasil Penilaian PBB-P2 ,

Indikator : Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan

NJOP nya sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan daerah

1.3 Subkegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah

Output : Dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah,

Indikator : Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah.

Subkegiatan ini menghasilkan data ketetapan obyek/subyek pajak daerah

2. Tersusunnya dokumen hasil pendataan obyek/subyek pajak/Retribusi baru, Indikator Jumlah hasil pendataan obyek/subyek pajak/Retribusi baru

pada subkegiatan :

2.1 **Subkegiatan Perencanaan pengelolaan pajak daerah**

Output : Penyusunan dokumen hasil perencanaan Pajak Daerah,

Indikator : Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah.

Subkegiatan ini menghasilan dokumen target pendapatan daerah, peta blok desa, data potensi pajak daerah

2.2 Subkegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah

Output : Penyusunan dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan dan Kebijakan Pajak Daerah,

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah.

Subkegiatan ini menghasilkan peraturan pajak dan retribusi daerah.

3. Meningkatnya penerapan system informasi pajak daerah berbasis digital dengan indikator outcome indeks elektronifikasi pemerintah daerah

Kegiatan , Subkegiatan pada outcome program ini :

1. Penyusunan Laporan Elektronifikasi Pemerintah Daerah dengan Indikator Jumlah Laporan Pembayaran Pajak dan Retribusi

Secara Online

Subkegiatan sasaran kegiatan ini :

1.1 **Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah**

Output : Pelaporan Realisasi Pembayaran Pajak dan Retribusi Non Tunai,

Indikator : Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transasksi Pemerintah Daerah. Indeks ETPD.

1.2 **Subkegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah**

Output : Laporan IKM Layanan Pajak Daerah,

Indikator : Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah

1.3 SubKegiatan Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah

Output : Laporan pelaksanaan Penyuluhan Pajak Daerah,

Indicator : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah.

4. Meningkatnya Deviden atas peyertaan modal pada BUMD dengan indikator prosentase realisasi deviden
5. Meningkatnya Realisasi Penerimaan lain-lain PAD yang sah dengan Indikator Prosentase Realisasi lain-lain PAD yang sah Outcome tersebut tidak ada kegiatan/Subkegiatan akan tetapi Bapaenda Kabupaten Nganjuk tetap melaksanakan kegiatan dengan rekonsiliansi data realisasi Deviden, sehingga diperoleh data realisasi pendapatan Asli Daerah.

3.3.1 Rumusan Tema dan Prioritas Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026

1. Tema

Peningkatan Daya Saing Daerah dan Transformasi Pelayanan Publik

2. Prioritas

a. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif
b. Pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup

c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
d. Peningkatan kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing
e. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik
f. Peningkatan kondisi social masyarakat yang harminis dan berbudaya

Dari uraian tersebut dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Badan Pendapatan daerah Sebagaimana table berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. NGANJUK
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENDAPATAN DAERAH						**24.343.264.274,00**							**24.275.500.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**24.343.264.274,00**							**24.275.500.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**24.343.264.274,00**							**24.275.500.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Sakip SKPD*** ***Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)*** ***Pelayanan pajak derah*** ***Nilai Sakip SKPD***	-			**90 Nilai** **85,5 %** **A Nilai**	**16.856.658.774,00**						-	**17.760.500.000,00**	
		[meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah]	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**80.50**	**75.70**	**75.80**	**75.85**	**16.856.658.774,00**	-	-	-	-	-	-	**17.760.500.000,00**	-
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi yang selesai*	-			13 dok	39.970.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi yang selesai	-	60.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	19.995.000,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi yang selesai		40.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	19.975.000,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi yang selesai		20.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	8.432.000,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Dokumen administrasi keuangan yang selesai		8.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				25 Laporan	49.938.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Dokumen administrasi keuangan yang selesai		50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Laporan Tingkat kehadiran ASN*	-			12 Laporan	328.353.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya disiplin ASN	-	357.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				55 Paket	56.952.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya disiplin ASN		51.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	4.999.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya disiplin ASN		6.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	266.402.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya disiplin ASN		300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi umum yang dilaksanakan*	-			12 Laporan	630.875.690,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya administrasi Umum	-	596.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				60 Paket	187.083.100,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya administrasi Umum		160.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				70 Paket	101.374.440,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya administrasi Umum		80.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				91778 Paket	49.999.900,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya administrasi Umum		55.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				720 Dokumen	5.400.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya administrasi Umum		6.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	9.998.250,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya administrasi Umum		10.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	207.020.000,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya administrasi Umum		210.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya administrasi Umum		75.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Diadakan*	-			2 Laporan	367.699.934,00			-	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	-	-	350.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	367.699.934,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	-		350.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanakan*	-			3 Jasa	912.738.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	-	-	1.006.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	-		6.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	241.700.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	-		300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	656.038.700,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	-		700.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah yang dipelihara*	-			52 Unit	301.481.350,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	-	-	302.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	199.723.650,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	-		200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	39.960.000,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	-		40.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	***prosentase realisasi pendapatan***	-			**100 %**	**7.486.605.500,00**						-	**6.515.000.000,00**	
		-	-	-	-	-	-	**7.486.605.500,00**	-	-	-	-	-	-	**6.515.000.000,00**	-
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Prosentase Realisasi Retribusi Daerah Daerah yang dikelola* *Jumlah Wajib Pajak Baru* *Jumlah Wajib Pajak yang Membayar Tepat Waktu* *Prosentase Realisasi Pajak Daerah*	-			100 % 1500 obyek/subyek pajak 697600 obyek/subyek pajak 100 %	7.486.605.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	6.515.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				3 Dokumen	418.300.700,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah		175.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	396.006.000,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah		150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	842.120.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah		400.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				10 Unit	500.000.000,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah		550.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	400.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah		500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				2 Laporan	250.000.000,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah		300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				3000 Obyek Pajak	75.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah		125.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				24 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah		270.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				35000 Layanan	100.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah		150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				12 Dokumen	1.800.000.000,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah		1.850.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				12 Dokumen	1.865.178.800,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah		1.250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				12 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah		120.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Dokumen	370.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah		425.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				2 Laporan	200.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah		250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	JUMLAH							**24.343.264.274,00**							**24.275.500.000,00**	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2026 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2026. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan unsur penunjang.

Tabel 4.1
Sasaran Perangkat Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (2026)	Alokasi (2026)
1	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Prosentase kenaikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2,77	Rp24.343.264.274,00
2	Meningkatnya Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah dan lain-lain PAD yang sah	Presentase Kenaikan Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah dan lain-lain PAD yang sah	1,67	

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2026.

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Kabupaten Nganjuk.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
    a. melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya; dan
    b. menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026; dan
3. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Badan Pendapatan Daerah dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.